

## **Penerapan Konsep *Value For Money* Dalam Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran**

### ***Implementation of the Value For Money Concept in Increasing Accountability, Transparency and Supervision toward Budget Performance***

**Yasmin Al-Hakim<sup>1</sup>; Harnovinsah<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana,  
E-mail: <sup>1</sup>yaxxha@gmail.com;  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana,  
<sup>2</sup>harnovinsah@mercubuana.ac.id

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money*. Penelitian ini dilakukan di 43 SKPD Provinsi DKI Jakarta. Dengan menggunakan metode sensus, jumlah responden penelitian ini adalah 86 aparat pemerintah. Pengujian statistik untuk menguji hipotesis menggunakan alat uji *Structural Equation Modelling* (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money*. Sementara itu, transparansi berpengaruh positif, namun tidak signifikan, terhadap kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money*.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan *value for money*

#### **Abstract**

*The concept of Value for Money defines the right things in the right way to achieve the greatest impact of government policies. This research aims at examining the effect of accountability, transparency, and supervision on the performance of budgeting of the Value For Money concept. Research conducted on 43 local work units in DKI Jakarta Province. By using census method, the sample of the research consists of 86 government officials. This research uses SEM analysis to test the hypothesis. The result of this research proven that accountability and supervision has significantly effect on the performance of budgeting of the Value for Money concept, while transparency showed no effect on effectiveness on the performance of budgeting of the Value for Money concept.*

*Keywords: accountability, transparency, supervision, value for money*

## **1. Pendahuluan**

Sebagai katalisator kebijakan, pemerintah seyogianya mengupayakan kemajuan yang luar biasa dalam memulihkan kepercayaan warga negaranya, serta mendorong pengembangan sosio-ekonomi inklusif masyarakatnya. Pemerintah harus menilai apakah suatu proyek mewakili konsep *Value for Money* atau tidak (OECD, 2010). Publikasi OECD (2016) merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk menanamkan kebijakan *Open Government*. OECD (2016) memaknai kebijakan *Open Government* sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokratis dalam sebuah negara untuk memperbaiki pemenuhan kebutuhan rakyat. Hal-hal pokok dari kebijakan *Open Government* tersebut mencakup: (1) memastikan hasil kebijakan yang lebih baik; (2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan; (3) memperbaiki kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan; (4) mendorong pengembangan sosio-ekonomi inklusif; dan (5) membina

inovasi (OECD, 2016). Inisiatif pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan *Open Government* sejalan dengan konsep *Value for Money*.

Penelitian Ababe (2012) menyebutkan bahwa efisiensi dalam penyelenggaraan kepentingan publik sangat penting untuk memastikan bahwa hasil maksimal dari anggaran dicapai oleh lembaga publik. Ababe (2012) menunjukkan bahwa tiga prinsip utama dalam penyelenggaraan kepentingan publik yang efektif dan pengelolaan yang baik adalah EAT (Efisiensi, Akuntabilitas dan Transparansi). Demikian pula dalam analisa reformasi *Open Government* Indonesia, OECD (2016) merancang empat prinsip kebijakan, yaitu keterlibatan publik, transparansi, akuntabilitas dan integritas. Kedua prinsip ini menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Namun demikian, komitmen pemerintah Indonesia untuk menjalankan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal (23-1), yaitu menetapkan bahwa anggaran negara "harus dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel" belum sepenuhnya tercapai. Dengan memperhatikan komitmen pemerintah yang tertuang dalam RPJMN tahap ketiga 2015-2019, serta keberlanjutan Program Nawa Cita pada butir kedua yaitu, membangun pemerintah yang "bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya", maka transparansi kinerja pemerintahan dinilai penting. Namun demikian, Indonesia mendapatkan *Exchange of Information Rating* (EOIR) berupa *partially compliant* yang maknanya *fail to meet commitment* (Choirun, 2017). EOIR didasarkan pada keterbukaan informasi keuangan pada instansi pemerintah Indonesia.

Di satu sisi, penelitian yang dilakukan oleh Demirag dan Khadaroo (2009) dengan menggunakan empat pengukuran kriteria akuntabilitas yaitu, keterandalan (*warrantability*), traktabilitas (*tractability*), keterukuran (*measurability*), dan kelayakan (*feasibility*) menyimpulkan perbaikan pada akuntabilitas akan meningkatkan *Value for Money* pada *Private Finance Initiative* (PFI) UK. Sementara itu, penelitian analisis komparatif Liu *et al.* (2014) pada *Public Private Partnerships* (PPP) di Australia dan Cina menyimpulkan dimensi transparansi dan akuntabilitas memengaruhi efektivitas dan efisiensi pada proses tender PPP. Sedangkan dalam konteks penelitian Christensen dan Læg Reid (2014) pada pemerintah Norwegia menyimpulkan adanya hubungan timbal balik (*mutual relationship*) antara akuntabilitas dan kinerja dengan spesialisasi pada reformasi administrasi publik. Sementara itu, penelitian Solikin (2015) pada pengelolaan anggaran fiskal tahun 2014 pemerintah Kabupaten Kediri menyebutkan bahwa kebijakan pengawasan berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas. Penelitian itu juga menjelaskan bahwa kebijakan pengawasan lebih diarahkan dalam kerangka kebijakan desentralisasi yang sarat dengan nilai-nilai efisiensi dan efektivitas untuk kepentingan pemerintah pusat sebagai pihak untuk mengawasi. Dengan memperhatikan rangkaian literatur ini, terlihat bahwa terdapat potensi bahwa akuntabilitas, transparansi dan pengawasan akan mempengaruhi kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*. Penelitian Pertiwi *et al.* (2015) menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran berkonsep *Value for Money* pada SKPD Provinsi Riau dipengaruhi oleh dimensi dan indikator dari akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan. Namun, pada hasil penelitian Putra (2017) pada Kabupaten Indragiri Hulu, akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Meski demikian, berdasarkan hasil telaah literatur yang dilakukan sampai saat ini belum ada penelitian yang menguji pengaruh keempat variabel tersebut pada SKPD Provinsi DKI Jakarta.

Adapun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta mencatat adanya peningkatan sebesar 102% pada pengeluaran belanja daerah, dari 31.55 Triliun pada tahun 2012 menjadi 63,63 triliun pada tahun 2017. Dalam rentang enam tahun, tiga komponen belanja terbesar terletak pada belanja pegawai sebesar Rp 86,1 triliun (32%), diikuti belanja barang jasa (29%) sebesar Rp 79 triliun, kemudian belanja modal (25%) sebesar Rp 68,62 triliun. Hal ini bertentangan dengan prinsip belanja menurut Kemendagri dimana seharusnya diprioritaskan untuk belanja publik. Setidak-tidaknya belanja publik harus 70 persen dari APBD (Rahardian, 2015). Belanja pegawai dinilai tidak tergolong pembelanjaan publik dan merupakan belanja tidak langsung.

Berdasarkan dari uraian di atas, kinerja anggaran pada tatanan pemerintah Provinsi DKI Jakarta patut dipertanyakan. Secara lebih spesifik, penelitian ini mengetahui sejauh mana SKPD DKI Jakarta berjalan dengan ekonomis, efisien dan efektif. Sedangkan dalam konteks transparansi, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilakukan oleh *Transparency International* tahun 2017 pada 12 kota besar di Indonesia menunjukkan hasil Kota Jakarta Utara (73,9) sebagai kota yang dinilai cenderung paling bersih. Hasil ini menunjukkan transparansi pada pemerintah Jakarta Utara sudah baik. Meski demikian, transparansi pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan perlu dikaji. Mengingat Indonesia sedang menuju pembangunan "negara terbuka", penelitian ini penting dilakukan untuk menerjemahkan komitmen keterbukaan di tingkat daerah, khususnya DKI Jakarta. Selain itu, *Value for Money* sebagai tolak ukur hasil kerja strategis atas kinerja anggaran pemerintah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik merupakan urgensi dari penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran berkonsep *Value for Money* pada SKPD Provinsi DKI Jakarta. Secara rincinya, pertama pengaruh pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money* pada SKPD Provinsi DKI Jakarta. Kedua, pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money* pada SKPD Provinsi DKI Jakarta. Ketiga, pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money* pada SKPD Provinsi DKI Jakarta.

## **2. Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis**

### **2.1. Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money***

Lukito (2014) menerangkan bahwa terdapat tiga jenis indikator yang saling terkait dalam konsep *Value for Money*, yaitu: indikator *input*, *output*, dan *outcomes*. Keterkaitan antara *input*, kegiatan (*process*), *output*, dan *outcomes* akan menilai efisiensi dan efektivitas, atau *Value for Money*. Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *Value for Money* yaitu, ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Sementara itu, NAO dalam dalam Treasury (2004) mendefinisikan *Value for Money* sebagai pengoptimalan sumber daya untuk mencapai hasil yang diharapkan. Penjabaran NAO atas konsep *Value for Money* tertuang dalam empat pilar yaitu: *economy—spending less* dengan meminimalisir biaya input atau sumber daya yang digunakan, *efficiency—spending well* dengan mencocokkan output dengan sumber daya untuk memproduksinya dengan budget yang sesuai, *effectiveness—spending wisely* dengan mencocokkan hasil pengeluaran yang diharapkan dengan hasil sebenarnya secara arif, dan *equity—spending fairly*, sejauh mana pelayanan pemerintah tersedia dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Sebagian masyarakat mungkin menerima tingkat pelayanan yang berbeda dikarenakan berbagai alasan.

### **2.2. Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan**

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya (Lukito, 2014). Pengukuran akuntabilitas pemerintah seringkali dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara perencanaan dengan realisasi (Moehariono, 2012). Dalam hal transparansi, dokumen anggaran harus bersifat terbuka, transparan, dan dapat diakses. Warga negara, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lain harus mampu mengakses laporan anggaran secara penuh dan tepat waktu (OECD, 2016). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses

kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.3. Hipotesis**

#### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada SKPD Provinsi DKI Jakarta**

Penelitian Demirag dan Khadaroo (2009) menyimpulkan adanya hubungan antara akuntabilitas dan *Value for Money* pada *Private Finance Initiative* (PFI) UK, serta penelitian Christensen dan Læg Reid (2014) menunjukkan adanya hubungan timbal balik (*mutual relationship*) antara akuntabilitas dan kinerja pada pemerintah Norwegia. Dalam hal ini, akuntabilitas bertitik pada bahwasanya pemerintah berkewajiban menjelaskan kepada rakyatnya kemana anggaran publik bermuara dan di mana *impact* anggaran tersebut terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Kewajiban ini mengacu pada tujuan dasar adanya suatu pemerintahan, yaitu melayani masyarakatnya. Maka, semakin tinggi akuntabilitas, semakin tinggi pula kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*.

H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh positif Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada SKPD Provinsi DKI Jakarta.

#### **Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada SKPD Provinsi DKI Jakarta**

Penelitian Ababe (2012) pada *Public Procurement* di Ehtiopia serta penelitian Liu *et al.* (2014) pada *Public-Private Partnerships* di Australia dan Cina menunjukkan adanya korelasi positif antara transparansi dan efisiensi terhadap efektivitas kinerja anggaran pemerintah, dimana efisiensi dan efektivitas tergolong salah dua indikator dari konsep *Value for Money*. Di samping itu, transparansi menjadi penting terhadap pencapaian kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money* berlandaskan kebutuhan rakyat untuk mengetahui apa dan bagaimana pemerintah merencanakan, dan menggunakan sumber daya keuangan. Masyarakat berhak untuk mengakses laporan realisasi anggaran daerahnya dengan mudah dan *reliable*. Maka, semakin tinggi transparansi, semakin tinggi pula kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*.

H<sub>2</sub>: Terdapat pengaruh positif Transparansi terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada SKPD Provinsi DKI Jakarta.

#### **Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada SKPD Provinsi DKI Jakarta**

Solikin (2015) pada pemerintah Kabupaten Kediri bahwa pengawasan berpengaruh terhadap nilai efisiensi dan efektivitas. Kemudian, penelitian Putra (2017) yang menunjukkan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada SKPD di Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun pengawasan dalam pencapaian kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money* berperan untuk menjamin segala aktivitas pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya, sesuai waktu dan sasaran anggarannya. Maka, semakin tinggi pengawasan, semakin tinggi pula kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*.

H<sub>3</sub>: Terdapat pengaruh positif Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money* pada SKPD Provinsi DKI Jakarta.

## **2. Metode Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melakukan pengelolaan anggaran pada 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pemberi rekomendasi belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan tahun anggaran 2019. Pemilihan populasi ini berdasar Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 578 Tahun 2018. Dengan memperhatikan luasnya ruang lingkup penelitian, penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sampel jenuh atau metode sensus. Oleh karena itu, setiap SKPD

diwakili oleh 2 sampel yang terdiri dari Kepala Dinas dan Kepala Bagian Keuangan. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 86 aparat pemerintah pada 43 SKPD selaku pemberi rekomendasi belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan tahun anggaran 2019. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner dengan ukuran Skala Likert yaitu, Sangat Setuju (SS) diberi skor 5, Setuju (S) diberi skor 4, Netral (N) diberi skor 3, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1. Teknik pengolahan data menggunakan *Partial Least Square* (PLS) terhadap kuesioner yang tersusun dari 38 butir pernyataan yang terstruktur berdasarkan dimensi dan indikator dari operasionalisasi variabel.

Tabel 1. Ringkasan Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Y: Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money	1. Alokasi biaya ekonomi dan efisiensi	VFM01: anggaran untuk kepentingan publik
		VFM02: anggaran dikelola ekonomis
	2. Kualitas pelayanan efektivitas (Mardiasmo, 2011)	VFM03: anggaran dikelola efisien
		VFM04: anggaran dikelola efektif
		VFM05: anggaran dikelola adil dan merata
		VFM06: anggaran tidak terkonsentrasi kelompok
		VFM07: ada peran pemerintah
		VFM08: belanja untuk kepentingan publik
		VFM09: anggaran digunakan efisien, hemat
		VFM10: anggaran berprinsip 3E
		VFM11: VFM mencapai Good Governance
X <sub>1</sub> : Akuntabilitas	1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran	AK1: pelibatan unsur masyarakat
		AK2: anggaran disajikan terbuka, cepat, tepat
		AK3: kepentingan publik perhatian utama
	2. Akuntabilitas proses	AK4: rakyat perlu tahu dokumen anggaran
		AK5: evaluasi anggarandenagn indikator kinerja
		AK6: proses anggaran diawasi terus-menerus
		AK7: penyertaan informasi masa lalu
		AK8: evaluasi anggaran membandingkan realisasi
		AK9: pertanggungjawaban vertikal dan horizontal
X <sub>2</sub> : Transparansi	1. Informasi memadai	TR1: pengumuman anggaran kepada masyarakat
		TR2: pemberian informasi anggaran kepada publik
		TR3: kemudahan akses dokumen anggaran
	2. Ada akses informasi	TR4: sulitnya akses dokumen anggaran (birokratis)
		TR5: musrembang untuk peningkatan transparansi
		TR6: laporan pertanggungjawaban tepat waktu
		TR7: akomodasi usulan/suara rakyat
		TR8: pengumuman anggaran didapat setiap waktu
		TR9: pengumuman anggaran mudah didapat
X <sub>3</sub> : Pengawasan	1. <i>Input</i> masukan pengawasan	PE1: masukan penyusunan anggaran
		PE2: aspirasi masyarakat dasar anggaran
		PE3: pengawasan anggaran internal dan eksternal
	2. Pengawasan perilaku	PE4: pengawasan anggaran rutin oleh Inspektorat
		PE5: pimpinan menilai kinerja anggaran bawahan
		PE6: DPRD mengawasi mekanisme anggaran
		PE7: pengawasan preventif, repretif oleh DPRD
		PE8: penugasan BPK mengawasi anggaran
		PE9: revisi anggaran berskala prioritas
3. <i>Output</i> keluaran pengawasan (Siagian, 2014)		

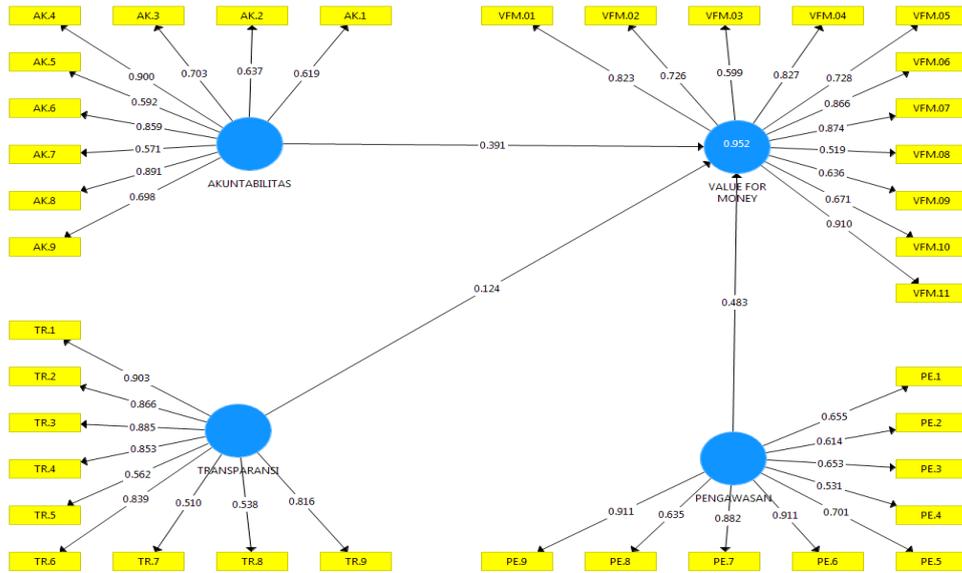
#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi ini menilai validitas dan reliabilitas model. Pertama, uji *convergent validity* dievaluasi dengan *outer loadings* dari masing-masing indikator yang mengukur konstruk. Nilai

loading factor 0,5 sampai 0,6 dapat dianggap cukup (Ghozali, 2014). Dengan demikian, semua indikator dinyatakan valid.

Kedua, uji discriminat validity dengan *Average Variance Extraxted (AVE)* untuk mengukur tingkat variansi suatu komponen konstruk yang dihimpun dari indikatornya dengan menyesuaikan pada tingkat kesalahan. Nilai AVE minimal yang direkomendasikan adalah 0.5 (Ghozali, 2014). Ketiga, uji *composite reliability* dan *cronbach's alpha* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Konstruk dinyatakan *reliable* jika nilai keduanya di atas 0.7 (Ghozali, 2014). Dengan demikian, semua data dikatakan *reliable*.



Gambar 3. Output diagram jalur

Tabel 3. Nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*

	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>AVE</i>
Akuntabilitas (AK)	0.90860	0.88645	0.53208
Transparansi (TR)	0.92550	0.90574	0.58996
Pengawasan (PE)	0.91033	0.88794	0.53855
Kinerja Anggaran Konsep <i>Value for Money</i> (VFM)	0.93357	0.92047	0.56738

### 4.3. Pengujian Hipotesis

#### Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi ini menguji ada atau tidak adanya pengaruh antar konstruk. *P-values* untuk mengetahui signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural dan *R-Square* untuk mengetahui pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh yang substantif.

Tabel 4. Pengujian Hipotesis

	Koefisien Parameter	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>	Keterangan
AK → VFM	0.39067	4.00928	0.00004	H <sub>1</sub> diterima
TR → VFM	0.12424	1.39062	0.08248	H <sub>2</sub> ditolak
PE → VFM	0.48341	5.57108	0.00000	H <sub>3</sub> diterima

Untuk menyimpulkan apakah hipotesis diterima atau ditolak, digunakan nilai *P-Values* pada signifikansi  $\alpha = 0,05$  (5%). Jika *P-Value*  $< 0,05$  maka hipotesis diterima atau terdapat pengaruh. Sebaliknya, jika *P-Values*  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak atau tidak ada pengaruh.

Dengan demikian, terlihat bahwa variabel akuntabilitas dan pengawasan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money*. Sementara itu, pada variabel transparansi dengan taraf signifikansi 0,05 (5%) tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money*. Namun, pada taraf signifikansi 0,1 (10%), variabel transparansi memiliki pengaruh terhadap kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money*. Hal ini dilihat dari nilai *P-Values* sebesar  $0.08248 < 0.1$ .

Adapun dilihat dari koefisien parameter jalur yang menjelaskan hasil hubungan antar konstruk atau antar variabel. Koefisien ini menunjukkan pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Mendukung  $H_1$  penelitian, pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money*, koefisien parameter jalur sebesar 0.39067 dengan nilai t-statistik  $4.00928 > 1.96$  pada taraf signifikansi  $\alpha = 0.05$  (5%) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara akuntabilitas terhadap kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu oleh Demirag dan Khadaroo (2009), Christensen dan Læg Reid (2014), dan Pertiwi *et al.* (2015). Terbuktinya hipotesis ini mengindikasikan pentingnya akuntabilitas dalam tubuh aparat pemerintahan. Hasil ini sejalan dengan paparan Teori *New Public Management* yang menekankan pada kedisiplinan yang tinggi dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Hasil ini pun membuktikan keseriusan pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan yang tertuang dalam RPJMN III Tahun 2015-2019 dan Program Nawa Cita yang diusung pemerintah pada butir kedua yaitu, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik.

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi *issue* sentral yang memengaruhi kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money* yang dijalankan oleh SKPD DKI Jakarta selaku penerima hibah APBD. Maka, semakin tinggi akuntabilitas yang dilakukan oleh SKPD DKI Jakarta dalam menjelaskan dan menjawab segala hal yang menyangkut penggunaan anggaran, akan semakin tinggi pula kinerja dari pelaksanaan anggaran berkonsep *Value for Money*.

Sementara itu, koefisien parameter jalur yang diperoleh dari pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money* adalah sebesar 0.12424 dengan nilai t-statistik  $1.39062 < 1.96$  pada taraf signifikansi  $\alpha = 0.05$  (5%) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara transparansi terhadap kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money*. Dengan demikian, asumsi awal yang menyatakan bahwa terdapat interaksi antara transparansi dalam memengaruhi kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money* pada SKPD DKI Jakarta tidak terbukti.

Faktor penyebab tidak berhasilnya menerima  $H_2$  pada signifikansi 5% adalah tidak semua SKPD DKI Jakarta melakukan transparansi anggaran dalam hal pengungkapan secara menyeluruh mengenai pengumuman anggaran kepada publik. Hasil penelitian ini membuktikan kondisi salah satu fenomena yang diangkat dalam penelitian ini bahwa di tahun 2017 Indonesia mendapatkan *Exchange of Information Rating* (EOIR) berupa *partially compliant*. SKPD DKI Jakarta terbukti belum melaksanakan keterbukaan informasi keuangan secara baik dan menyeluruh kepada publik.

Jakarta sedang menuju ke pemerintahan yang transparan (*Open Government* Indonesia, 2017). Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan berbagai portal data untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi penyelenggaraan pemerintah. Salah satunya adalah Portal Open Data ([data.jakarta.go.id](http://data.jakarta.go.id)) dan KPI Jakarta ([kpi.jakarta.go.id](http://kpi.jakarta.go.id)). Kedua *website* ini mengusung tema

yang sama, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan kemudahan memantau sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintah secara *online*. *Open Government Indonesia* (2017) menjelaskan bahwa Portal Open Data merupakan Portal Data Terpadu yang menyajikan data-data dari seluruh SKPD DKI Jakarta. Demikian halnya dengan KPI Jakarta yang berisi informasi mengenai indikator performa kinerja seluruh SKPD DKI Jakarta dalam bentuk presentase dari target yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas kerja dan menentukan target yang lebih nyata dalam pembangunan DKI Jakarta ke depannya.

Namun, kedua *website* ini cenderung tidak diberdayakan secara maksimal oleh Pemprov. Pada *website* Portal Open Data ([data.jakarta.go.id](http://data.jakarta.go.id)), data realisasi APBD DKI Jakarta Per SKPD yang paling terbaru adalah tahun 2014. Tidak ada data keuangan terbaru yang dapat diakses oleh masyarakat. Sedangkan pada *website* KPI Jakarta ([kpi.jakarta.go.id](http://kpi.jakarta.go.id)), tidak ada data yang dapat disajikan. Hal ini dikarenakan *website* ini masih dalam tahap pengembangan. Dalam kondisi ini, masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam pemerintahan tidak dapat mengevaluasi serta meneliti keputusan dan kinerja pejabat publik hasil kerja pemerintah. Kondisi ini pun mencerminkan pernyataan OECD (2006) bahwa transparansi adalah salah satu penghalang paling efektif terhadap korupsi dalam pengadaan publik.

Adapun hasil pengujian hipotesis mendukung H<sub>3</sub> penelitian dimana koefisien parameter jalur yang diperoleh dari pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money* adalah sebesar 0.48341 dengan nilai *t*-statistik 5.57108 > 1.96 pada taraf signifikansi 5% yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengawasan terhadap kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money*. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi hasil penelitian terdahulu oleh Solikin *et al.* (2015), Pertiwi *et al.* (2015), dan Putra (2017). Pengawasan menjadi konstruk yang paling signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money* pada SKPD DKI Jakarta. Hasil ini sesuai dengan prinsip pengelolaan anggaran yang diutarakan oleh OECD dalam Kajian *Open Government Indonesia* (2016), dimana pengawasan menjadi salah satu dari pilar dari pengelolaan anggaran modern yang baik. Pengawasan pada anggaran pemerintah berperan untuk menjamin ketepatan penggunaan anggaran tersebut dalam program maupun kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Lebih lanjut, pengawasan harus dilakukan terhadap kesesuaian waktu penggunaan anggaran tersebut. Anggaran yang dicanangkan untuk suatu program memiliki rentang waktu proses penyelesaian. Pengawasan diperlukan untuk menjamin bahwa anggaran digunakan secara arif dan berkonsep *Value for Money*. Hal ini mengindikasikan pengawasan menjadi indikator penting dalam pencapaian kinerja anggaran, yang bermuara pada peningkatan realisasi output program. Solikin *et al.* (2015) menggambarkan bahwa pengawasan pemerintah diarahkan terhadap setiap urusan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh otoritas lokal dan dengan kebijakan regional yang telah dihasilkan.

## 5. Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money* pada SKPD Provinsi DKI Jakarta. Transparansi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money* pada SKPD Provinsi DKI Jakarta. Pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money* pada SKPD Provinsi DKI Jakarta.

Implikasi penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk meningkatkan kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money* sebaiknya memperhatikan faktor akuntabilitas dan pengawasan dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintah. Pemerintah dinilai akuntabel apabila mampu menyajikan hasil yang maksimal dari program maupun kebijakan yang dilaksanakan. Kemudian, pemerintah dinilai mawas diri terhadap penggunaan anggaran apabila sesuai dengan perencanaan dan hasil yang dicapai. Kedua, transparansi juga cukup berperan penting

untuk meningkatkan kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money*. Apabila aparat pemerintah mengganggap transparansi laporan penggunaan anggaran pemerintah itu penting untuk disajikan tepat waktu, informatif dengan penggunaan tabel maupun grafik serta mudah diakses maka kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money* akan meningkat.

Untuk meningkatkan transparansi terhadap kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money*, SKPD DKI Jakarta perlu mengimplementasikan platform *website* pemerintah secara terus-menerus. Aparat pemerintah sebaiknya dibentuk tim kreatif untuk menampilkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara menarik dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Media sosial dapat digunakan oleh aparat pemerintah SKPD DKI Jakarta sebagai platform interaktif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat menyangkut penggunaan anggaran daerahnya. Setiap divisi pada SKPD DKI Jakarta dihimbau melakukan pengumuman penggunaan daerah secara tepat waktu dan akurat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan sudut pandang hanya menggunakan satu sudut pandang, yaitu dari sisi masyarakat. Dalam prakteknya, persepsi responden yang disampaikan dalam penelitian ini belum tentu mencerminkan keadaan sesungguhnya. Walaupun responden mengisi pernyataan kuesioner dengan skala setuju maupun sangat setuju, pengimplementasian konsep akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan *Value for Money* belum tentu dilaksanakan secara nyata. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan sudut pandang dari sisi masyarakat dimana masyarakat dinilai sebagai pemegang kuasa absolut. Penelitian ini tidak mengindahkan sudut pandang dari tantangan yang dihadapi oleh pemerintah itu sendiri dalam mencapai kinerja yang diinginkan oleh masyarakat. Akhirnya, penilaian kinerja anggaran dengan konsep *Value for Money* tidak hanya diukur oleh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan, serta tidak terpaku pada bidang pemerintahan saja. Konsep *Value for Money* merupakan pilar pengelolaan anggaran modern yang patut dikaji dan diteliti lebih lanjut.

#### **Daftar Referensi**

- Ababe, G., (2012). Efficiency, Accountability and Transparency in Public Procurement: The Level of Compliance in Africa Ethiopian Case. In *5th International Public Procurement Conference*. [www.ippa.org/IPPC5/Proceedings/Part6/PAPER6-1.pdf](http://www.ippa.org/IPPC5/Proceedings/Part6/PAPER6-1.pdf)
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015*. Retrieved from <http://www.bpk.go.id/ihps>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016*. Retrieved from <http://www.bpk.go.id/ihps>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017*. Retrieved from <http://www.bpk.go.id/ihps>
- Bappeda. (2018). *Informasi APBD 2017 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. Retrieved from [https://bappeda.jakarta.go.id/uploads/document/2017-0127/47/47\\_02\\_Bab\\_II\\_LKPJ\\_20121.pdf](https://bappeda.jakarta.go.id/uploads/document/2017-0127/47/47_02_Bab_II_LKPJ_20121.pdf)
- Choirun, (2017). Kata Menkeu soal rating EOIR dari OECD. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/kata-menkeu-soal-rating-eoir-dari-oecd>.
- Christensen, T., & Læg Reid, P., (2015). Performance and Accountability - A Theoretical Discussion and an Empirical Assessment. *Public Organization Review*, Vol. 152 pp. 207-225.
- Demirag, I., & Khadaroo, I., (2011). Accountability and Value for Money: A Theoretical Framework for the Relationship in Public-Private Partnerships. *Journal of Management & Governance*, Vol. 152 pp. 271-296.
- Ghozali, I., L., H., (2014). *Partial Least Square: Konsep, Teknik dan Aplikasi SmartPLS 2.0 M3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Liu, T., Wang, Y., & Wilkinson, S., (2016). Identifying Critical Factors Affecting the Effectiveness and Efficiency of Tendering Processes in Public-Private Partnerships PPPs: A

- Comparative Analysis of Australia and China. *International Journal of Project Management*, Vol. 344, pp. 701-716.
- Lukito, P., (2014). *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi ke Depan*. Jakarta: Grasindo.
- Mardiasmo, (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moeheriono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- OECD, (2016). *OECD Kajian Open Government Indonesia*. Retrieved from [www.oecd.org/gov/open-gov-review-indonesia-kajian.pdf](http://www.oecd.org/gov/open-gov-review-indonesia-kajian.pdf).
- OECD, (2010). Publishing and Organisation for Economic Co-operation and Development. *Value for Money in Government Public Administration After New Public Management*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Pertiwi, D., P., Satriawan, R., A., Ali, A., A., (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value for Money Pada Instansi Pemerintah Studi Empiris SKPD Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa JOM Bidang Ilmu Ekonomi*, Vol. 2(1) pp. 1-15.
- Putra, G., (2017). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. *JOM Fekon*, Vol. 4(1) pp. 163-177.
- Rahardian, (2015). Anggaran Belanja Publik dalam APBD DKI Dikritisi Kemendagri. Retrieved from [www.cnnindonesia.com/nasional/20150402201453-20-43963/anggaran-belanja-publik-dalamapbddki-dikritisi-kemendagri](http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150402201453-20-43963/anggaran-belanja-publik-dalamapbddki-dikritisi-kemendagri)
- Solikin, M., Sjamsuddin, S., Zauhar, S. & Muluk, M., K., (2015). Central Government Supervision Strategy to Local Government: Case of Delay in the Determination of the Local Budget in Kediri Regency in East Java Indonesia. *Ijmas*. <https://www.ijmas.org/2-6/IJMAS-2906-2015.pdf>
- Treasury, H., M., (2006). *Value for Money Assessment Guidance*. Retrieved from [www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/252858/vfm\\_assessmentguidance061006opt.pdf](http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/252858/vfm_assessmentguidance061006opt.pdf)